

## **Green Tourism Policy: Studi Komparatif Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dan Malaysia**

### **Green Tourism Policy: A Comparative Study of Sustainable Tourism Policy in Indonesia And Malaysia**

**Adang Aldhila**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*email: adangaldhila@umsu.ac.id

#### **ABSTRACT**

*This study analyzes the comparative green tourism policies of Indonesia and Malaysia from a comparative public administration perspective. The effectiveness of sustainable tourism is determined not only by the substance of the policy but also by the institutional structure and governance capacity of the country. The study uses a qualitative approach with a comparative public policy design. The results show that Indonesia implements a decentralized participatory green governance model that emphasizes community empowerment and regional flexibility, but faces the challenge of fragmented implementation due to variations in institutional capacity. In contrast, Malaysia has developed a centralized regulatory green governance model that is more consistent in standardizing and overseeing policies through strong federal coordination. Differences in state administrative structures have been shown to be a determining factor in the design and effectiveness of sustainable tourism policies. This study confirms that strengthening green tourism requires a balance between national regulatory consistency and local participation as the foundation of sustainable governance.*

**Keywords:** *Green Tourism, Tourism Policy, Comparative Public Administration, Sustainable Governance.*

#### **ABSTRAK**

*Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia organisasi. Dengan mempertimbangkan manfaat dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran media digital dapat meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi IMM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan yang mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi komunikasi di IMM meningkatkan efektivitas organisasi, asalkan diimbangi dengan literasi digital dan komunikasi tatap muka untuk menjaga nilai-nilai organisasi.*

**Kata Kunci:** *Green Tourism, Kebijakan Pariwisata, Administrasi Negara Komparatif, Tata Kelola Berkelanjutan.*

## **Pendahuluan**

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi global dan regional, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja, perolehan devisa, serta penguatan identitas budaya nasional. Namun demikian, pertumbuhan pariwisata yang masif juga memunculkan konsekuensi ekologis dan sosial, seperti peningkatan emisi karbon, degradasi lingkungan, tekanan terhadap sumber daya alam, serta komodifikasi budaya lokal. Kondisi ini mendorong lahirnya paradigma *green tourism* sebagai pendekatan pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Secara konseptual, *green tourism* berakar pada gagasan *sustainable development* sebagaimana dirumuskan dalam laporan *Our Common Future* (World Commission on Environment and Development, 1987), yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dalam perkembangan teoritiknya, pendekatan ini diperkuat oleh konsep *Triple Bottom Line* yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) (Elkington, 1997). Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, *green tourism* tidak lagi dipahami sebagai praktik teknis semata, melainkan sebagai integrasi kebijakan lintas sektor yang menuntut koordinasi antara negara, masyarakat, dan pasar.

Urgensi *green tourism* semakin relevan ketika dikaitkan dengan tren pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Di Indonesia, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada periode Januari–September 2025 mencapai ±11,43 juta orang, meningkat 10,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif hingga November 2025, jumlah kunjungan wisman diperkirakan mencapai ±13,98 juta orang. Rata-rata pengeluaran wisman tercatat sebesar US\$ 1.297,31 per kunjungan dengan lama tinggal rata-rata 10,7 malam. Selain itu, perjalanan wisata domestik juga meningkat signifikan hingga ±901,90 juta perjalanan pada periode yang sama, tumbuh 18,99% dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2025). Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia kembali menjadi penggerak ekonomi nasional, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Sementara itu, Malaysia juga mengalami tren pemulihan pariwisata yang signifikan. Pemerintah Malaysia mencatat sekitar 25 juta kedatangan wisatawan internasional sepanjang tahun 2024, meningkat sekitar 24,2% dibandingkan tahun 2023, meskipun sedikit di bawah target nasional (Reuters, 2025a). Pada periode Januari–Mei 2025, jumlah kedatangan wisatawan internasional telah mencapai sekitar 16,9 juta orang, meningkat sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Reuters, 2025b). Di samping itu, survei domestik menunjukkan bahwa kunjungan wisata domestik Malaysia pada kuartal ketiga 2025 mencapai ±72,6 juta perjalanan, meningkat 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya (Department of Statistics Malaysia, 2025). Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata Malaysia memiliki fondasi struktural yang kuat dan didukung oleh sistem tata kelola nasional yang relatif terintegrasi.

Dari perspektif akademik, peningkatan kunjungan wisata tersebut berimplikasi langsung terhadap tekanan lingkungan, penggunaan energi, dan emisi karbon. Di kawasan Asia Tenggara, sektor pariwisata memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berkorelasi signifikan dengan peningkatan emisi karbon apabila tidak diimbangi kebijakan mitigasi berbasis teknologi hijau dan tata kelola berkelanjutan (Aini, 2024). Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan *Environmental Policy Integration*, yaitu integrasi dimensi lingkungan ke dalam seluruh proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Dalam perspektif tata kelola kebijakan publik, keberhasilan implementasi *green tourism* sangat dipengaruhi oleh model *governance* yang diterapkan. Literatur kebijakan membedakan antara *participatory governance*, yang menekankan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi multi-aktor, dan *regulatory governance*, yang berfokus pada standarisasi regulasi dan koordinasi terpusat (Fathani, Azmi, Purnomo, Tham, & Ahmad, 2023). Indonesia cenderung mengembangkan model partisipatif melalui pemberdayaan desa wisata dan ekonomi lokal (Budiatiningsih, Minanda, & Hulfa, 2025), sementara Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur melalui *National Tourism Policy 2020–2030* yang menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu pilar utama pembangunan sektor pariwisata (Tourism Malaysia, 2020).

Perbedaan pendekatan tersebut menjadi menarik untuk dikaji secara komparatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif kebijakan *green tourism* di Indonesia dan Malaysia

dalam perspektif tata kelola kebijakan publik dan integrasi kebijakan lingkungan. Penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek sektoral pariwisata, tetapi juga pada dimensi yang lebih luas, yakni kajian perbandingan administrasi negara (*comparative public administration*). Perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan unsur-unsur administrasi dari berbagai sudut pandang (Anggara, 2012).

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem pemerintahan, struktur kelembagaan, pola desentralisasi, serta budaya birokrasi yang melingkupinya. Oleh karena itu, perbandingan kebijakan *green tourism* antara Indonesia dan Malaysia juga merupakan perbandingan antara dua model administrasi negara yang memiliki karakteristik berbeda dalam pengelolaan sektor publik.

Perbandingan antarnegara bertujuan untuk memahami bagaimana konteks kelembagaan dan struktur administrasi memengaruhi *output* kebijakan (Farazmand, 2012). Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain normatifnya, tetapi juga oleh konfigurasi birokrasi, pola hubungan pusat–daerah, dan mekanisme akuntabilitas administratif. Oleh karena itu, membandingkan Indonesia dan Malaysia menjadi relevan karena keduanya berada dalam kawasan geografis dan kultur yang relatif serumpun, tetapi memiliki struktur administrasi yang berbeda.

Studi perbandingan ini juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan kemungkinan transfer kebijakan (*policy transfer*) antarnegara ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi sektoral pada kajian pariwisata berkelanjutan, tetapi juga memperkaya diskursus administrasi negara komparatif di kawasan Asia Tenggara. Dengan memasukkan dimensi perbandingan administrasi negara, penelitian ini berupaya menjembatani kajian kebijakan sektoral dengan teori tata kelola publik dan administrasi komparatif, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengembangan kebijakan *green tourism* di tingkat regional maupun global.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain komparatif kebijakan publik (*qualitative comparative policy analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan menggali makna, struktur kelembagaan, serta mekanisme tata kelola kebijakan green tourism di dua sistem administrasi yang berbeda. Pendekatan kualitatif sangat tepat untuk memahami kompleksitas proses kebijakan, relasi aktor, serta konteks sosial-politik yang melingkupi kebijakan publik (Ritchie & Lewis, 2020). Desain penelitian komparatif efektif dalam memetakan perbedaan struktural antarnegara serta dampaknya terhadap output kebijakan (Blatter & Haverland, 2019).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Green Tourism* dalam Perspektif Teori Pembangunan Berkelanjutan**

Konsep *green tourism* merupakan turunan operasional dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang pertama kali dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* (World Commission on Environment and Development, 1987). Laporan tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (World Commission on Environment and Development, 1987). Dalam konteks pariwisata, prinsip ini diterjemahkan sebagai integrasi antara konservasi lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pariwisata berkelanjutan harus memenuhi tiga dimensi utama, yakni: (1) optimalisasi sumber daya lingkungan, (2) penghormatan terhadap autentisitas sosial-budaya masyarakat tuan rumah, dan (3) kelayakan ekonomi jangka panjang (UNWTO, 2018). Ketiga dimensi ini menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan kebijakan *green tourism* di Indonesia dan Malaysia.

Dalam perspektif teori administrasi publik, implementasi *green tourism* tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kelembagaan negara. (Peters, 2019) menegaskan bahwa institusi publik membentuk pola interaksi kebijakan melalui aturan formal, norma birokrasi, dan distribusi kewenangan. Oleh karena itu, perbandingan Indonesia dan Malaysia menjadi relevan karena

keduanya memiliki sistem administrasi yang berbeda—Indonesia dengan desentralisasi luas, dan Malaysia dengan federalisme terkoordinasi.

### **Dimensi Lingkungan: Antara Modernisasi Ekologis dan Regulasi Negara**

Dalam perspektif *Ecological Modernization Theory* (EMT), perlindungan lingkungan dapat dicapai melalui reformasi kelembagaan, inovasi teknologi, serta integrasi regulasi lingkungan dalam sistem ekonomi modern (Mol & Spaargaren, 2000). Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Malaysia menginternalisasi prinsip ekologis dalam kebijakan pariwisata.

Indonesia melalui kebijakan destinasi prioritas nasional berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan wisata seperti Labuan Bajo dan Danau Toba. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tekanan terhadap daya dukung lingkungan masih menjadi tantangan akibat peningkatan kunjungan wisatawan dan lemahnya pengelolaan limbah di beberapa daerah (Putra & Hitchcock, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan pusat dan kapasitas implementasi di tingkat daerah.

Sebaliknya, Malaysia melalui *National Tourism Policy 2020–2030* secara eksplisit mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan yang terstandarisasi secara nasional (*Tourism Malaysia, 2020*). Pendekatan Malaysia lebih sistematis dalam penerapan sertifikasi hijau dan pengawasan lingkungan di destinasi wisata. Pendekatan ini mencerminkan model regulatif yang lebih terkoordinasi (Nešić, Milošević, Spalević, Nikolić, & Smilić, 2023).

Dengan demikian, dalam perspektif EMT, Malaysia cenderung lebih dekat dengan model modernisasi ekologis berbasis regulasi nasional, sementara Indonesia menunjukkan pendekatan adaptif yang bergantung pada kapasitas pemerintah daerah.

### **Dimensi Sosial: Partisipasi Komunitas dan Collaborative Governance**

*Green tourism* tidak hanya menyangkut aspek ekologis, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam teori *Collaborative Governance* menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik berbasis keberlanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2008). Kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan tentu menjadi salah satu penentu keberhasilan kebijakan public, terutama kebijakan pada sektor pariwisata.

Indonesia memiliki kekuatan dalam pengembangan *community-based tourism* (CBT), terutama melalui desa wisata yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Model ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi, sehingga manfaat ekonomi lebih terdistribusi secara lokal (Nuryanti, 2022). Dalam konteks ini, desentralisasi memberikan ruang inovasi kebijakan berbasis komunitas. Namun, variasi kapasitas antar daerah menyebabkan ketimpangan kualitas implementasi. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan tata kelola yang memadai untuk mengelola pariwisata berkelanjutan secara optimal.

Malaysia juga mengembangkan program *homestay* dan ekowisata komunitas, tetapi dalam kerangka perencanaan strategis yang lebih dikendalikan oleh pemerintah federal (Hamzah & Khalifah, 2020). Model ini menghasilkan konsistensi standar, namun relatif lebih *top-down* dibandingkan model Indonesia. Secara teoritik, Indonesia menunjukkan pola *deliberative participatory governance* yang menekankan pada partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik melalui mekanisme dialog, musyawarah, dan pertimbangan rasional (deliberasi) sementara Malaysia mencerminkan *managed collaborative governance*, tata kelola kolaboratif yang dikelola secara terstruktur dengan dominasi negara untuk memastikan kolaborasi antar pemangku kepentingan berjalan efektif, terkoordinasi, dan menghasilkan kebijakan yang implementatif.

### **Dimensi Ekonomi: Keberlanjutan dan Daya Saing Global**

Secara ekonomi, sektor pariwisata merupakan penyumbang signifikan terhadap PDB kedua negara. Data World Bank menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, kontribusi pariwisata terhadap PDB Malaysia mencapai lebih dari 10%, sementara Indonesia berkisar 5–6% (World Bank, 2022). Namun demikian, keberlanjutan ekonomi tidak hanya diukur dari kontribusi PDB, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan dan distribusi manfaat ekonomi. Dalam pariwisata berkelanjutan penting menekankan meminimalkan *economic leakage* dan meningkatkan *local multiplier effect*.

Malaysia cenderung mengembangkan strategi *high-value tourism* dengan fokus pada wisatawan berkualitas tinggi dan belanja besar. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam transisi dari pariwisata massal menuju model berbasis kualitas dan keberlanjutan. Dari perspektif ekonomi keberlanjutan, Indonesia memiliki potensi besar melalui

desa wisata dan UMKM lokal, tetapi membutuhkan penguatan rantai nilai dan integrasi pasar global.

### **Analisis Administrasi Negara Komparatif dalam Kebijakan Pariwisata**

Pendekatan *Comparative Public Administration* menekankan bahwa struktur negara, distribusi kewenangan, dan kapasitas birokrasi secara langsung memengaruhi desain dan implementasi kebijakan publik (Farazmand, 2012). Dalam sektor pariwisata, perbedaan sistem administrasi Indonesia dan Malaysia tercermin pada cara kedua negara merumuskan kebijakan strategis, mengkoordinasikan aktor, serta mengimplementasikan prinsip keberlanjutan.

**Tabel 1. Perbandingan Kerangka Kebijakan Pariwisata Nasional**

<b>Aspek</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>
Dasar Hukum	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<i>National Tourism Policy 2020–2030</i>
Sistem Administrasi	Desentralisasi luas	Federal terkoordinasi
Aktor Dominan	Pemerintah daerah + Kemenparekraf	Pemerintah federal (MOTAC)
Pendekatan Kebijakan	Partisipatif dan berbasis komunitas	Regulatif dan terstandarisasi
Model Implementasi	<i>Bottom-up adaptive governance</i>	<i>Top-down coordinated governance</i>
Standar Keberlanjutan	CHSE, Desa Wisata	Sertifikasi nasional & <i>green standards</i>

*Sumber: Peneliti, 2026*

Di Indonesia, kebijakan pariwisata berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menekankan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Kebijakan ini kemudian diterjemahkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNas) serta program Destinasi Pariwisata Super

Prioritas (DPSP). Namun, karena Indonesia menerapkan desentralisasi luas pasca reformasi, kewenangan pengelolaan destinasi sebagian besar berada pada pemerintah daerah.

Desentralisasi ini memberikan fleksibilitas inovasi kebijakan lokal, tetapi juga menimbulkan variasi kualitas implementasi. Sistem desentralisasi, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan norma birokrasi di tingkat subnasional (Peters, 2019). Dalam konteks Indonesia, perbedaan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia antar daerah menyebabkan standar *green tourism* tidak selalu terimplementasi secara seragam.

Sebaliknya, Malaysia mengatur sektor pariwisata melalui *National Tourism Policy 2020–2030* yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya di tingkat federal (Tourism Malaysia, 2020). Meskipun Malaysia adalah negara federal, kebijakan strategis pariwisata lebih terkoordinasi secara nasional. Negara bagian memiliki kewenangan operasional, tetapi kerangka regulasi dan standar tetap ditentukan secara terpusat. Dalam perspektif kebijakan publik, Indonesia menunjukkan model *Bottom-up adaptive governance*, sementara Malaysia cenderung mengadopsi *Top-down coordinated governance*.

Instrumen kebijakan pariwisata mencakup regulasi, insentif fiskal, sertifikasi lingkungan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Menurut teori *policy instruments*, efektivitas kebijakan bergantung pada kombinasi instrumen yang digunakan (Howlett, 2019). Indonesia menggunakan pendekatan kombinatorik antara regulasi dan pemberdayaan masyarakat. Program desa wisata dan sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) menjadi instrumen utama dalam mendorong standar keberlanjutan. Namun, pengawasan terhadap kepatuhan standar masih bergantung pada kapasitas pemerintah daerah.

Malaysia lebih menekankan standardisasi dan sertifikasi formal dalam pengelolaan destinasi. Pendekatan ini mencerminkan karakter *centralized regulatory governance*, di mana kontrol dan evaluasi lebih sistematis. Studi Rasoolimanesh, Ramakrishna, Hall, & Esfandiar (2023), menunjukkan bahwa Malaysia relatif lebih konsisten dalam penerapan standar keberlanjutan berbasis regulasi nasional dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur administrasi negara menentukan pilihan instrumen kebijakan. Indonesia lebih menekankan pemberdayaan dan fleksibilitas lokal, sementara Malaysia mengedepankan konsistensi regulatif.

Koordinasi vertikal menjadi isu sentral dalam kebijakan pariwisata berkelanjutan. Ansell & Gash (2008), menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam kebijakan kompleks seperti *green tourism*. Indonesia memiliki hubungan pusat-daerah dalam sektor pariwisata yang sering kali menghadapi tantangan sinkronisasi kebijakan dan perbedaan prioritas pembangunan. Fragmentasi kewenangan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengelolaan daya dukung lingkungan dan investasi pariwisata.

Malaysia dengan struktur federal yang lebih terkoordinasi, menunjukkan integrasi kebijakan yang relatif lebih stabil. Namun, dominasi pemerintah pusat dalam perencanaan strategis dapat membatasi inovasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Dalam perspektif *multi-level governance*, Indonesia mencerminkan model yang lebih pluralistik, sedangkan Malaysia menunjukkan model hierarkis-terkoordinasi. Perbedaan konfigurasi administrasi antara Indonesia dan Malaysia memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas kebijakan *green tourism*. Di Indonesia, sistem desentralisasi memberikan ruang bagi inovasi lokal dan mendorong partisipasi komunitas secara aktif, sehingga model kebijakan yang diterapkan bersifat adaptif terhadap konteks sosial dan budaya setempat. Namun, fleksibilitas ini sekaligus menimbulkan tantangan berupa fragmentasi implementasi dan ketimpangan kapasitas antar daerah. Harmonisasi standar nasional dan penguatan kapasitas institusional daerah menjadi prasyarat penting agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebaliknya, Malaysia menerapkan kebijakan pariwisata hijau yang lebih terkoordinasi secara federal, dengan standar nasional yang konsisten dan mekanisme pengawasan yang terpusat. Pendekatan ini memastikan kualitas implementasi lebih seragam di seluruh wilayah, namun cenderung membatasi ruang bagi partisipasi lokal dan inovasi berbasis komunitas. Peningkatan fleksibilitas kebijakan di tingkat negara bagian dapat menjadi strategi untuk memperkuat dimensi partisipatif tanpa mengorbankan konsistensi regulatif.

Dari perspektif administrasi negara komparatif, kedua model ini membentuk tipologi kebijakan yang berbeda. Indonesia menunjukkan pola *decentralized participatory green tourism policy*, yang menekankan pemberdayaan lokal dan adaptasi sosial-budaya, tetapi rentan terhadap disparitas kualitas implementasi. Malaysia, di sisi lain, mengembangkan *coordinated federal green tourism policy*, yang berbasis standar nasional dan pengawasan terstruktur, sehingga lebih konsisten namun relatif kurang fleksibel.

Efektivitas kebijakan pariwisata hijau tidak semata ditentukan oleh substansi normatif, tetapi juga oleh kemampuan sistem pemerintahan dalam mengelola koordinasi antar-level, konsistensi regulasi, dan partisipasi komunitas secara simultan. Pendekatan hibrid yang mengintegrasikan fleksibilitas lokal dan standar nasional dapat menjadi arah pengembangan kebijakan berkelanjutan yang optimal.

## **Penutup**

Kebijakan *green tourism* di Indonesia dan Malaysia tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan sektoral di bidang pariwisata, melainkan sebagai refleksi dari konfigurasi administrasi negara masing-masing. Indonesia dengan sistem desentralisasi luas dan Malaysia dengan sistem federalisme terkoordinasi. Perbedaan sistem pemerintahan berimplikasi langsung terhadap desain, instrumen, dan efektivitas implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan. Dimensi lingkungan, Malaysia menunjukkan konsistensi regulatif yang lebih kuat melalui standardisasi nasional dan mekanisme monitoring terpusat. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan variasi implementasi akibat perbedaan kapasitas administratif antar daerah, meskipun memiliki fleksibilitas adaptif yang lebih tinggi. Dimensi sosial, Indonesia relatif unggul dalam pengembangan *community-based tourism* yang mencerminkan praktik *collaborative governance*. Partisipasi masyarakat lokal menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan sosial dan distribusi manfaat ekonomi. Namun, ketimpangan kapasitas kelembagaan daerah menyebabkan kualitas implementasi tidak seragam. Malaysia menunjukkan pola partisipasi yang lebih terstruktur dalam kerangka regulasi federal yang kuat. Dimensi ekonomi, Malaysia lebih terarah pada strategi *high-value tourism* dengan fokus pada daya saing global dan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Indonesia memiliki potensi besar melalui pemberdayaan UMKM dan desa wisata, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengurangi *economic leakage* dan meningkatkan integrasi rantai nilai lokal.

Efektivitas kebijakan *green tourism* sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi publik, koordinasi antar-level pemerintahan, serta konsistensi instrumen kebijakan. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan pariwisata berkelanjutan bukan hanya persoalan substansi normatif, tetapi bergantung pada arsitektur kelembagaan dan tata kelola negara. Indonesia merepresentasikan model *decentralized participatory green governance*, sedangkan Malaysia mencerminkan *centralized regulatory green governance*. Kedua model memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing,

sehingga pendekatan hibrid yang menggabungkan fleksibilitas partisipatif dan konsistensi regulatif dapat menjadi arah pengembangan kebijakan di masa depan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrohman, H., A'lam, N. N., Hidayati, Q. D., & Swarnawati, A. (2025). Efektivitas Grup WhatsApp sebagai Media Komunikasi Organisasi di UMKM Pengolah Limbah Tekstil. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(1), 1–7.
- Ainun, F. P., Mawarni, H. S., Sakinah, L., Lestari, N. A., & Purna, T. H. (2022). Identifikasi transformasi digital dalam dunia pendidikan mengenai peluang dan tantangan di era disrupsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1570–1580.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.
- Darmansah, T., Lubis, M. B., Hasanah, U., Sembiring, D. F., Ramadhani, P. S., & Lubis, D. M. B. (2024). Transformasi Digital Dalam Manajemen Persuratan Terhadap Perubahan Proses dan Peran Teknologi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Dharmajaya, A., & Minangkabawi, H. (2024). Membangun Kepercayaan yang Berkelanjutan di Era Disruptif Komunikasi: Perspektif Media dan Komunikasi Digital. *Jurnal Komunikasi*, 18(2).
- Istighfarin, A., Istikhomah, F., & Pratama, A. D. (2024). Penggunaan Media Digital dalam Komunikasi Organisasi pada Kepanduan: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 4(1), 98–105.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Johnny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE.
- Puspitasari, N. D., & Aslan. (2024). Transformasi Komunikasi Organisasi Melalui Teknologi Digital: Studi Literatur Terbaru. *Jurnal Komunikasi*, 2(12), 934–943.
- Rizal, A., Kahfi, S. N., Abdurrahman, Wulandono, & Tono. (2023). Manajemen perubahan di era digital: Tantangan dan peluang bagi adaptasi organisasi. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 933–941.
- Yahya, A., & Dirgantara, P. (2022). Efektivitas Penggunaan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Organisasi Di Lingkungan Pegawai Dinas Atr/Bpn Kota Palembang. *Medium*, 10(1), 409–420.